

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2018

Dika Hasto Muhammad Afif

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
dikahasto4@gmail.com

Abstract

Tujuan: *The high level of income inequality in D.I Yogyakarta shows the existence of uneven economic development. This study aims to analyze the effect of per capita GRDP, total population, and general allocation funds in the Special Region of Yogyakarta.*

Metode: *This study uses a fixed effect model (FEM) analysis method with secondary data in the form of panel data consisting of cross-sectional data from 5 districts/cities and time-series data from 2010 to 2018. The data is processed with Eviews 10.*

Hasil: *The results of the study indicate that the GRDP per capita variable has a significant effect on income inequality in D.I Yogyakarta.*

Originalitas: *Meanwhile, the variables of Population and General Allocation Funds show insignificant results on the level of income inequality in D.I Yogyakarta*

Keywords: *Income Inequality, Per capita GRDP, Total Population, and General Allocation Fund, fixed effect model*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses dari berbagai dimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap, mental dan kelembagaan, termasuk pula laju perubahan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan mengatasi kemiskinan (Todaro, 2000). Ketimpangan pendapatan antar wilayah tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar bagi negara-negara yang sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) (Tambunan, 2001). Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sehingga diperlukan usaha dalam pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang setinggi-tingginya, dan juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi masyarakat akan memberikan pendapatanguna memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

Termasuk pula laju perubahan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan mengatasi kemiskinan (Todaro, 2000). Ketimpangan pendapatan antar wilayah tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar bagi negara-negara yang sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi

pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) (Tambunan, 2001). Perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sehingga diperlukan usaha dalam pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang setinggi-tingginya, dan juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi masyarakat akan memberikan pendapatanguna memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Pendapatan (Pengertian, Ukuran dan Penyebab)

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah- daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2004).

Todaro dan Smith (2004) juga menjelaskan bahwa untuk menganalisis ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan koefisien Gini yang merupakan sebagai ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,75, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Semakin besar nilai koefisien Gini, maka mengindikasikan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin kecil nilai koefisien Gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan.

Dalam mengukur ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah dapat digunakan indeks Williamson. Indeks ini merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah menurut Sjafrizal (2008:107). Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakintimpang. dan juga dapat menggunakan indeks Bonet, Indeks ini merupakan pengukuran yang dilakukan oleh Bonet (2006) untuk mengukur ketimpangan sebagai variabel dependen dalam penelitiannya untuk menghitung pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di negara Kolumbia.

Variabel yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004).

Jumlah penduduk dalam konteks pembangunan mempengaruhi belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah dipandang sebagai aset modal dasar

pembangunan atau sebagai pemacu pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai penghambat pemerataan pendapatan. Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pemerataan pendapatan. Dengan keadaan yang demikian di memungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah untuk mengelola dan mengatur segala kewenangan yang berada di daerahnya masing-masing. Desentralisasi mempunyai tujuan agar pemerintah daerah dalam mengelola daerah akan lebih efisien khususnya pada sektor publik, dan hal tersebut akan menunjang terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kebijakan yang dilakukan daerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah, kekayaan SDA di daerah serta SDM yang berada di daerah diharapkan akan mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai: perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Kuznets juga mengasumsikan bahwa kelompok pendapatan tinggi memberikan kontribusi modal dan tabungan yang besar sementara modal dari kelompok lainnya sangat kecil. Dengan kondisi-kondisi lain yang sama, perbedaan dalam kemampuan menabung akan mempengaruhi konsentrasi peningkatan proporsipemasukan dalam kelompok pendapatan tinggi. Proses ini akan menimbulkan dampak akumulatif, yang lebih jauh akan meningkatkan kemampuan dalam kelompok pendapatan tinggi, kemudian akan memperbesar kesenjangan pendapatan dalam suatu negara.

Menurut pandangan ahli-ahli Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi

Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) muncul dikarenakan kinerja teori neoKlasik yang tidak memuaskan dalam menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang telah menyebabkan kekecewaan yang meluas terhadap teori pertumbuhan ekonomi neoKlasik. teori pertumbuhan endogen atau secara lebih sederhana disebut dengan teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), menyajikan suatu kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan Gross National Product (GNP) yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya ekulibrium jangka panjang (Todaro, 1994).

Teori Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan

menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Bird dan Vaillancourt 1998). Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau Dana Alokasi Umum. Menurut Prawirosetoto (Pujiati 2006), Dana Alokasi Umum adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment).

Dana Alokasi Umum ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (public goods / public service). Dengan kata lain, Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih 2003).

Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Prinsip dari Dana Alokasi Umum tersebut adalah money follow functions, dimana Pemerintah Daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya.

Penelitian Terdahulu

1. Putri dan Natha (2015) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan menggunakan analisis TSLS, dapat disimpulkan bahwa setiap variable independent secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
2. Al-Faizah (2018) dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Sulawesi. Dengan menggunakan analisis regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa nilai jumlah penduduk, IPM, dan Investasi secara individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Lestari (2016) dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Dengan menggunakan analisis TSLS data panel, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur
4. Hartini (2017) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh PDRB per kapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I.Yogyakarta. Dengan menggunakan analisis regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa secara simultan PDRB per kapita, investasi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendaptan di provinsi D.I.Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tingkat ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi (pdrb), jumlah penduduk, sektor pengeluaran pemerintah (DAU) sehingga total variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 variabel

Berikut adalah definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tingkat Ketimpangan Pendapatan, adalah persentase ketimpangan pendapatan yang ada pada suatu daerah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah tingkat ketimpangan pendapatan dengan satuan persen (%) menggunakan Indeks Bonet yang menggambarkan proporsi distribusi pendapatan pada masing-masing kabupaten/kota di D.I Yogyakarta pada tahun 2010-2018.
2. Pertumbuhan Ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dilihat dengan menggunakan pertumbuhan secara keseluruhan pada masing-masing sektor yang ada didalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB atas dasar harga konstan) di setiap wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data PDRB Perkapita untuk masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010- 2018.
3. Jumlah penduduk adalah Jumlah populasi penduduk yang ada pada setiap wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada setiap tahunnya. Data yang digunakan adalah data jumlah penduduk dengan satuan jiwa untuk masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018.
4. Dana Alokasi Umum adalah pengeluaran pemerintah yang diterima suatu daerah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Dana Alokasi Umum dengan satuan persen (%) yang menggambarkan proporsi terhadap penerimaan pemerintah untuk masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2018

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, DJPK Kementerian Keuangan RI serta jurnal-jurnal ilmiah tentang perekonomian Indonesia hingga tahun 2018. Data yang diteliti meliputi data Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan ketimpangan pendapatan (Indeks Bonet) untuk daerah penelitian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari time series dan cross section. Data time series dengan periode tahun 2010-2018 sedangkan data cross section adalah 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model yang diolah dengan menggunakan Eviews 10. Model penelitian yang digunakan sebagai berikut:

$$[KP]_{it} = \beta_0 + \beta_1 peit + \beta_2 Jpit + \beta_3 Daut + \epsilon_{it} \dots\dots\dots ()$$

Keterangan:

- Kp = Variabel Ketimpangan pendapatan
Pe = variabel pertumbuhan ekonomi
DaU = Variabel Dana Alokasi Umum
Jp = Variabel Jumlah Penduduk
 ϵ_{it} = nilai residu / error
 i = cross section
 t = time series

Menurut Gujarati dan Porter (2012) menyatakan bahwa suatu model penelitian secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) apabila memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Deteksi Normalitas

Menurut Gujarati and Porter (2012), dilakukannya deteksi normalitas adalah dengan tujuan untuk menguji dalam model regresi, apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal, apabila dilanggar maka hasil dari uji statistik tidak akan berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji distribusi residual adalah dengan Jarque-Bera (JB). Dengan kriteria apabila JB hitung kurang dari Chi-Square tabel, atau nilai JB lebih besar dari 0,05 maka nilai residual terdistribusi normal begitupun sebaliknya.

Deteksi Multikolinieritas

Deteksi Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik menurut Ghazali (2013), seharusnya tidak memiliki multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Penelitian ini menggunakan matriks korelasi antar variabel independen untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Apabila nilai korelasi pada matriks korelasi antar variabel independen memiliki nilai di atas 0,80, maka model tersebut terkena gejala multikolinieritas.

Deteksi Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Apabila ada korelasi, maka dinyatakan ada masalah autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan menyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak adanya variabel lag di antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2013), uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Sehingga dapat diartikan bahwa heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan variasi pada variabel yang diamati dan kesalahan yang terjadi menunjukkan adanya hubungan yang sistematis atau sesuai dengan besarnya satu bahkan lebih variabel independen sehingga kesalahan tidak random. Ada beberapa cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya adalah dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual (Abs U_i) terhadap variabel independen lainnya. Apabila koefisien variabel independen X_i , yaitu β , signifikan secara statistik, maka terindikasi terdapat heteroskedastisitas dalam model.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3.
Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.817532	0.020161	40.55038	0.0000
PDRB	0.002894	0.000618	4.686016	0.0000
JML_PENDUDUK	-4.41E-08	2.50E-08	-1.760815	0.0865
DAU	0.000117	6.55E-05	1.791002	0.0815

Tabel 3.2 Hasil Estimasi

Variabel Dependen = Ketimpangan Pendapatan			
Variabel Independen	Hubungan Antar Variabel	Hipotesis Penelitian	Signifikansi
Pertumbuhan Ekonomi	+	+	Signifikan
Jumlah penduduk	-	-	Tidak signifikan
Dana Alokasi Umum (DAU)	+	-	Tidak signifikan

Sumber: data diolah dengan Eviews 10

Pada tahapan ini, dapat dikonfirmasi bahwa satu dari tiga variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan yaitu PDRB perkapita sedangkan Jumlah penduduk dan Dana Alokasi Umum tidak signifikan secara statistik.

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I.Y pada tahun 2010 – 2018. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi di D.I.Y akan mengakibatkan kenaikan Ketimpangan pendapatan di D.I.Y. Dapat dilihat dari nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 0,05 yaitu 0.0000 dan koefisien sebesar 0.002894. hal ini sejalan dengan penelitian Hartini (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Dan hal ini juga sesuai dengan Teori Kuznet bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pendapatan per kapita dengan ketimpangan pendapatan.

Jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I.Y pada tahun 2010 – 2018. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan persebaran penduduk di D.I.Y tidak signifikan mengakibatkan kenaikan Ketimpangan pendapatan di D.I.Y . Dapat

dilihat dari nilai probabilitas Jumlah penduduk lebih besar dari 0,05 yaitu 0.0865 dan koefisien sebesar $-4.41E-08$. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Susi Lestari (2016) bahwa Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Yang berakibat bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah akan mengalami penurunan kesempatan kerja yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

tingkat Pengeluaran Pemerintah (Dana Alokasi Umum) memiliki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I.Y pada tahun 2010 – 2018. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah di D.I.Y akan mengakibatkan kenaikan Ketimpangan pendapatan di D.I.Y . Dapat dilihat dari nilai probabilitas Pengeluaran Pemerintah lebih besar dari 0,05 yaitu 0.0815 dan koefisien sebesar 0.000117. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Natha (2015) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi D.I.Y tahun 2010-2018.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di D.I.Y. Hal ini menunjukkan bahwa semakin cepat atau semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, maka tingkat ketimpangan pendapatan juga semakin meningkat. Cepat atau tingginya laju pertumbuhan ekonomi yang tidak terkontrol akan menimbulkan fenomena ketimpangan pendapatan dikarenakan pertumbuhan di satu sisi daerah sangat cepat dibandingkan daerah yang lain sehingga menimbulkan gap yang tinggi antara penduduk kaya dan miskin.

REFERENSI

Agusalim, L. (2016). *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia*. *Kinerja*, 20(1), 53–68.

Alfiansyah, H. (2019). *Analysis of Interregional Development Inequality*. 2013–2017.

Amalia, F. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010* . X, 158–169.

Apriesta, L. F. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah)*. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1), 1–12.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariant dan Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Semarang.

- Gujarati, D. N., & Porter, D. c. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*.
- Hartanti, N. T. (2017). *Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). *Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat*.
- Hasna, S. (2015). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah*. Jurnal BPPK, 8(2), 169–182.
- Hastuti, P. (2018). *Effect of Regional Political Stability on the Implementation of Fiscal Decentralization in Indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 785–787.
- Hidayat, M. H. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012*. Skripsi, 1–74.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 8(3), 250.
- Ir. Taryono. (2012). *Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan*. Pustaka.Ut., 1.2-1.51.
- Keuangan, K. (2019). *Rincian Dana Alokasi Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Apbn*.
- Lestari, S. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012*.
- M. Nur Ali Ramadhan. (2013). *Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2008-2013*. X, 1–21
- Mangkoesebroto, G. (1999). *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mustika, C. (2011). *Pengaruh Pdb Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008* (Vol. 1, Issue 4).
- Nurmainah, S. (2013). *Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerjaterserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhanekonomi Dan Kemiskinan (Studi kasus 35 kabupaten / kota diProvinsi Jawa Tengah)*. 20, 131–141.
- Putra, L. D. (2011). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007*.

- Putri, N. P. V. S., & Natha, I. K. S. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan* . E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4, 41–49.
- Retnosari, D. (2006). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*.
- Rosadinata, O. (2004). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur 1995-2002*.
- salma audiena. (2018b). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015*.
- Sari, N. I. (2018). *Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014*. 2(4), 446–455.
- Siagian, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2010-2016*.
- Sonny Harmadi. (2008). *Pengantar Demografi*. 1–48.
- Sri, M., & Wahyudi, S. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (Pdb) Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia*.
- Sugiyono. Prof, D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jmpk, 08(03), 121–129.
- Susanti, S. (2013). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto , Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel*. 9(1), 1–18.
- Susilo, A. (2017). *indkes williamson*.
- Tiara, S. (2016). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomikawan, 5, 1–16.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga* (Jilid 2). Erlangga.
- Tri, K., Politeknik, W., & Stis, S. (2019). *Pengaruh Industri Terhadap Ketimpangan Antardaerah Di Jawa Tengah*. In Prosiding Sendika (Vol. 5, Issue 2).
- Valentiana, N. P., & Putri, S. (2014) *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan* . E-Jurnal Ep Unud, 4 [1] : 41-49.



Widodo, A., Waridin, & Maria K., J. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42.

Winarno, W. W. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews (Ketiga)*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP STIM YKPN).